



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN

Jl. Jetayu No. 4 Pekalongan 51141

(0285) 421972

Website : <https://dinkes.pekalongan.go.id>

Email : dinkes.pekalongan@gmail.com



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Kesehatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Kami sangat berharap agar LKjIP tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang nantinya akan diperoleh umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi bahan masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pekalongan, Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan



Dr. Slamet Budiyanto, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19710118 199303 1 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024. Dinas Kesehatan pada tahun 2024 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kesehatan pada tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Kesehatan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 83.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Kesehatan sebesar 83,2 dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,85%.

2. Indikator capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dengan target yang ditetapkan 100%

Berdasarkan penilaian SPM Kesehatan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bahwa untuk penilaian tahun 2024 nilai capaian SPM Kesehatan sebesar 97,52%. Sehingga capaian untuk indikator kinerja SPM Kesehatan sebesar 97,52%.

Kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 109.431.803.805,00 atau 95,5% dari total pagu anggaran sebesar Rp 114.592.355.000,00.

Capaian kinerja Dinas Kesehatan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.3 KONDISI APARATUR.....	3
1.4 ISU STRATEGIS.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026.....	8
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026.....	10
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	13
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	16
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	26
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH.....	30
BAB IV PENUTUP.....	34
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kerja tahun 2024. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah:

1. Mengetahui pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.
2. Sebagai acuan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam peningkatan kinerja.
3. Sebagai bukti pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan ini, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.



1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki beberapa poin penting antara lain mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan, mempermudah akses layanan kesehatan, mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana, meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan, melindungi tenaga kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang diorganisir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber daya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititik beratkan pada upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Walaupun demikian kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat perlu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif dirasa belum optimal sehingga direformasi ke Paradigma Sehat yang akan meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk.

Untuk mewujudkan Paradigma Sehat sebagai paradigma pembangunan kesehatan yang baru, telah dirumuskan Tujuan Pembangunan Kesehatan Kota Pekalongan yaitu **"Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat"**. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Dinas Kesehatan mempunyai arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026.

Adapun arah kebijakan di bidang kesehatan tersebut antara lain :

- 1) Peningkatan mutu pelayanan KB sesuai standar di Puskesmas dan RS;
- 2) Mempersiapkan 14 Puskesmas menjadi Puskesmas mampu persalinan;
- 3) Peningkatan cakupan imunisasi melalui Posyandu dan peningkatan peran CSR;



- 4) Semua persalinan baik di Fasyankes pertama maupun rujukan wajib melaksanakan IMD, implementasi Perda ASI Eksklusif;
- 5) Semua balita kurang gizi mendapatkan Makanan Tambahan (PMT) dan balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan lewat Posyandu maupun secara mandiri;
- 6) Penjaringan Suspek TB Paru dengan kunjungan rumah dan pemeriksaan kontak erat pada kasus BTA Positif;
- 7) Penjaringan dan edukasi masyarakat untuk pemeriksaan secara teratur minimal 6 bulan sekali;
- 8) Peningkatan pelayanan dan pelatihan petugas serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk penanganan penderita gangguan jiwa berat;
- 9) Implementasi Perda KTR, lomba PHBS dan monitoring KTR di sekolah, tempat umum dan tempat kerja serta tempat ramah anak;
- 10) Monitoring penggunaan air bersih untuk rumah tangga dan penyakit yang ditularkan melalui air;
- 11) Meningkatkan cakupan ODF dan Monitoring jamban keluarga pada 27 Kelurahan;
- 12) Penambahan dukungan anggaran untuk terwujudnya Universal Health Coverage
Sesuai Misi 7 dalam RPJMD, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Government* dan *Clean Government*, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan juga memiliki arah kebijakan antara lain:
 - 1) Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja
 - 2) Meningkatkan dukungan administrasi perkantoran
 - 3) Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras aparatur
 - 4) Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
 - 5) Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
 - 6) Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan

Tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran dan cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan tahunan.

1.3 KONDISI APARATUR

1.3.1 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari;

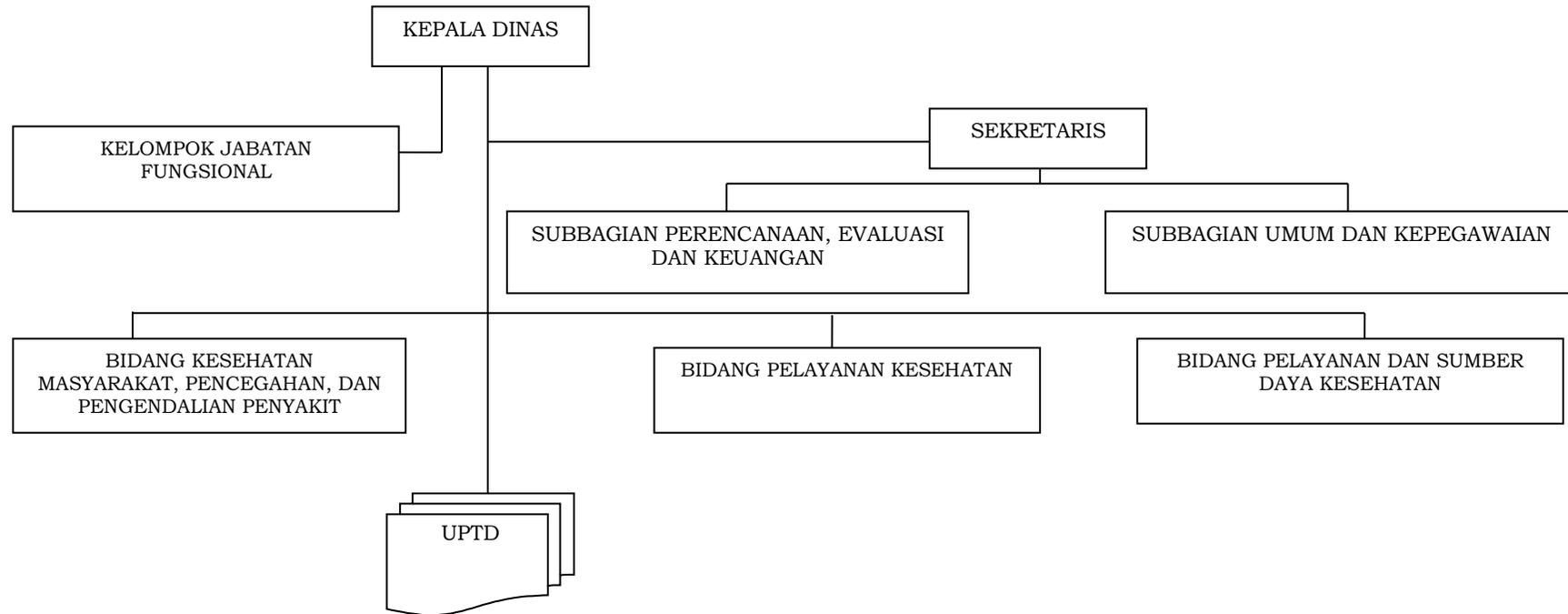


- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan
- d. Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- f. Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu RSUD Benda Kota Pekalongan
- g. Unit Organisasi Bersifat Fungsional, terdiri dari :
 - 1) UPT Puskesmas Benda (Puskesmas Rawat Inap)
 - 2) UPT Puskesmas Medono
 - 3) UPT Puskesmas Kramatsari
 - 4) UPT Puskesmas Tirto
 - 5) UPT Puskesmas Noyontaan
 - 6) UPT Puskesmas Tondano
 - 7) UPT Puskesmas Klego
 - 8) UPT Puskesmas Sokorejo (Puskesmas Rawat Inap)
 - 9) UPT Puskesmas Kusuma Bangsa (Puskesmas Rawat Inap)
 - 10) UPT Puskesmas Krapyak Kidul
 - 11) UPT Puskesmas Dukuh
 - 12) UPT Puskesmas Pekalongan Selatan (Puskesmas Rawat Inap)
 - 13) UPT Puskesmas Jenggot
 - 14) UPT Puskesmas Buaran
- h. UPTD, terdiri dari :
 - 1) UPTD Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu (BPSJ)
 - 2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN





1.3.2 Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 733 orang dengan perincian sebagai berikut :

- PNS : 424 orang
- CPNS : 0 orang
- PPPK : 49 orang
- Tenaga Kontrak : 9 orang
- Tenaga BLUD : 199 orang
- Tenaga Kegiatan : 50 orang
- Tenaga Hibah : 2 orang
- Jumlah (Total) : 733 orang

Berdasarkan data tersebut terdapat penurunan jumlah tenaga di Dinas kesehatan dari 755 orang pada tahun 2023 menjadi 733 orang pada tahun 2024.

b) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana Pemerintah yang ada di Kota Pekalongan yang bersifat pelayanan kesehatan antara lain meliputi:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Kesehatan Pemerintah di Kota Pekalongan
Tahun 2024

No	Jenis Sarkes Milik Pemerintah	Barat	Timur	Utara	Selatan	Total
1	Rumah Sakit	1	0	0	0	1
2	Puskesmas Rawat Jalan	3	3	2	2	10
3	Puskesmas Rawat Inap	1	1	1	1	4
4	Puskesmas Pembantu	7	5	6	5	23
5	Posyandu	131	108	99	80	418
6	BKPM	0	0	0	0	0
7	Instalasi Farmasi Kota	0	1	0	0	1
8	Labkesda	1	0	0	0	1
9	BP Umum	0	0	1	0	1
10	Apotek	19	25	15	13	72



1.4 ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2021-2026 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, SDG's) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya angka kematian ibu. Adapun faktor penyebab kematian ibu maternal adalah eklampsia, perdarahan, emboli, gagal jantung (*decompensasicordis*).
- 2) Masih tingginya angka kematian bayi. Adapun faktor penyebab kematian bayi adalah BBLR, asfiksia, kelainan bawaan, ikterus, dan penyebab lain.
- 3) Masih tingginya angka kematian balita. Adapun faktor penyebab kematian balita adalah pneumonia dan infeksi pencernaan.
- 4) Masih ditemukannya gizi buruk pada balita. Adapun faktor penyebab adalah penyakit infeksi, pola asuh yang kurang baik.
- 5) Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular (DBD, HIV/AIDS, kusta, TB, filariasis). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang kurang sehat.
- 6) Kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular (hipertensi, DM, jantung) dan gangguan kejiwaan. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup dan pola makanyang tidak sehat serta lingkungan sosial yang tidak mendukung.
- 7) Masih kurangnya sarana, prasarana pendukung pelayanan kesehatan baik sarana medis, sarana penunjang pelayanan medis dan non medis.
- 8) Masih kurangnya akses/jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.



Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada Dinas Kesehatan Tahun 2024

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		



Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
Tujuan Kota : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,57
Tujuan Dinas Kesehatan 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
Sasaran Dinas Kesehatan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83
Program Dinas Kesehatan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
Kegiatan Dinas Kesehatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
Tujuan Dinas Kesehatan 2 : Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,35
Sasaran Dinas Kesehatan 2 : Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Persentase capaian SPM Kesehatan	100%
Program Dinas Kesehatan 2 : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91%
Kegiatan Dinas Kesehatan 2 : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100%

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Kesehatan disajikan pada Tabel 2.2.1



Tabel 2.2.1

Target Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N	Inspektorat
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian SPM Kesehatan	Persen	Rata-rata capaian indikator SPM Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2

Target Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	87,50	88	88,50	89,00	89,50	90
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian SPM Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana



Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

No	Sasaran Strategis	Indikator	2024	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	83
2	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 64.762.812.000	APBD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 46.326.248.000	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 713.406.000	APBD
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 600.676.000	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 2.189.213.000	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kesehatan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- Arahan Operasional
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.



- Akuntabilitas

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk



memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Gambaran keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam mencapai sasaran, direpresentasikan oleh Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hasil pengukuran kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Skor	83	83,2	100,85%	Sangat berhasil
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100%	97,52%	97,52%	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 98,76% dengan kategori Sangat Berhasil.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun
Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	86,3	82,15	83,2	▲
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	93,14	95,56	97,52	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun



Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	83,2	83,5	99,64	Sangat Berhasil
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	97,52	100	97,52	Sangat berhasil

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks	82	82,79	100,96	Sangat berhasil
2.	Meningkatkan indeks keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,35	0,38	108,57	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 (dua) target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 104,77 % dengan kategori Sangat Berhasil.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 mendapatkan angka nilai capaian sebesar 100,85% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Nilai SAKIP OPD	-	Skor	86,30	82,15	83	83,2	100,85	83,5



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah.

Tahun 2024. Hasil evaluasi AKIP Dinas Kesehatan memperoleh nilai 83,2 atau predikat "A". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Kesehatan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,2
2	Pengukuran Kinerja	30	25,5
3	Pelaporan Kinerja	15	12
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	20,5
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,2
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

Tabel 3.8 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP TAHUN 2024	NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP TAHUN 2024
1	BAPPEDA	88,50	16	DPMPSTP	77,90
2	DINKOMINFO	83,40	17	DINAS PERHUBUNGAN	77,15
3	DLH	85,45	18	DINPERPA	76,10
4	DINDANGKOP & UKM	85,75	19	KEC. PEKALONGAN SELATAN	77,00
5	INSPEKTORAT DAERAH	84,60	20	DINARPUS	75,45
6	DPU-PR	81,25	21	KEC. PEKALONGAN BARAT	76,15
7	BPKAD	84,50	22	KEC. PEKALOGAN UTARA	76,10
8	DPMPPA	82,75	23	KEC. PEKALONGAN TIMUR	76,25
9	DKP	83,25	24	BPBD	75,45
10	BKPSDM	83,20	25	DINPERINAKER	75,45
11	DINDUKCAPIL	82,90	26	DINSOSP2KB	75,90
12	DINKES	83,20	27	DINPERKIM	74,75
13	SETDA	81,50	28	SATPOL-P3KB	74,25



NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP TAHUN 2024	NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI AKIP TAHUN 2024
14	DINDIK	78,45	29	SEKRETARIAT DPRD	75,15
15	DINPARPUDPORA	77,55	30	KESBANGPOL	73,45

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di subbagian perencanaan dan evaluasi dengan bidang-bidang dalam satu Organisasi Perangkat Daerah;
- Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.985.000	21.985.000	21.474.800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.045.580.000	62.169.490.000	59.616.540.767
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	401.626.000	437.626.000	432.000.900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.161.987.000	1.161.987.000	1.135.053.044
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.117.641.000	1.017.729.000	938.645.755

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,89%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100,85%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,17%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan, sebagai berikut:



- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di Sekretariat.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya komitmen dari Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan administrasi keuangan melalui proses digital yang mudah, efektif, dan efisien.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya peran aktif dari petugas dalam melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya petugas pengelola kegiatan yang konsisten dan berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya petugas pengelola kegiatan yang konsisten dan berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya petugas pengelola kegiatan yang konsisten dan berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



SASARAN 2 : Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 mendapatkan angka nilai capaian sebesar 97,52% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase capaian SPM Kesehatan	88,06	Persen	93,14	95,56	100	97,52	97,52	100

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- Meningkatnya upaya promosi kesehatan terhadap masyarakat
- Meningkatnya program upaya pencegahan kematian ibu, bayi, dan balita
- Tersedianya anggaran yang mendukung pelaksanaan program penunjang SPM
- Tersedianya SDM yang memadai untuk melaksanakan program penunjang SPM

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.848.039.000	11.635.521.000	11.518.088.832
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.448.103.000	34.598.552.000	32.190.851.801
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	22.500.000	22.500.000	21.380.000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.675.000	69.675.000	67.175.000



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	716.411.000	713.406.000	706.395.500
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	48.495.000	48.495.000	47.007.856
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	503.431.000	503.431.000	498.376.100
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	48.750.000	48.750.000	47.530.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.127.518.000	2.127.518.000	2.124.597.450
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.695.000	61.695.000	61.686.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94,89%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 97,52%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,77%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 4 (empat) program, sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terutama di fasilitas kesehatan primer. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 4 (empat) kegiatan, antara lain:
 - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan



- indikator Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD) dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya komitmen yang kuat antar stakeholder terkait.
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam memberikan promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang juga didukung dengan peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan.
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya peran aktif dari personil yang menangani Sistem Informasi Kesehatan baik personil di Dinas Kesehatan maupun pengelola Sistem Informasi di Puskesmas.
 - d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan dengan fasyankes di Kota Pekalongan yang berjalan dengan baik.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program dan kegiatan ini tercapai karena adanya koordinasi yang berjalan dengan baik antara stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan maupun kader kesehatan.



3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan, antara lain:
 - a. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator kegiatan ini tercapai karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara petugas dari Dinas Kesehatan dengan apotek, took obat, dan toko alat kesehatan di Kota Pekalongan.
 - b. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator kegiatan ini tercapai karena adanya peran aktif dari masyarakat pemilik Pangan Industri Rumah Tangga dalam mengurus izin produksi serta adanya dukungan anggaran dari BPOM.
 - c. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM). Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator kegiatan ini tercapai karena adanya kerja sama dan peran aktif dari petugas dan masyarakat pemilik TPM dan DAM dalam mengurus izin laik hygiene sanitasi.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Target untuk indikator ini adalah 93% dan realisasi 97,22% sehingga capaiannya 104,54%. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, antara lain:



- a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri dengan target 33% dan realisasi 48,8% sehingga capaiannya 147.89%. Indikator kegiatan ini tercapai karena adanya peran aktif dari kader kesehatan dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat melalui posyandu di tiap kelurahan.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator kegiatan ini tercapai karena adanya peran aktif petugas promosi kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp 114.592.355.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 109.431.803.805,00 atau sebesar 95,5%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp 52.542.295.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 49.899.030.038,00 atau sebesar 94,97%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	3.498.000	99,94
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.485.000	3.485.000	100
3			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.491.800	96,61
4		Administrasi Keuangan Perangkat	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62.050.060.000	59.532.773.767	95,89



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)	
5		Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.395.000	80.592.000	96,64	
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.230.000	3.175.000	98,30	
7		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	100	
8		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.196.100	83,92	
9			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.067.000	129.446.000	98,02	
10			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	5.830.000	77,73	
11			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.559.000	96.167.600	99,59	
12			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.000.000	25.991.200	99,97	
13			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.380.000	95,20	
14			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.000.000	167.990.000	99,99	
15			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	597.000	99,50
16		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		625.383.000	603.688.070	96,53	
17		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		536.004.000	530.767.974	99,02	
18		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.824.000	198.938.369	85,08	
19			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.705.000	679.759.090	97,01	
20			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000	59.948.296	92,23	
21		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.364.015.000	3.364.010.200	100
22				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	536.444.000	533.740.000	99,50
23				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	283.295.000	278.330.700	98,25
24				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	756.660.000	744.925.000	98,45



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
25			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	303.201.000	298.171.045	98,34
26			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.326.906.000	6.234.974.387	98,55
27			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	65.000.000	63.937.500	98,37
28		Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.000.000	117.635.000	94,11
29			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	196.795.000	189.519.500	96,30
30			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	156.413.000	154.523.000	98,79
31			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	99.142.000	94.742.000	95,56
32			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	163.173.000	161.243.000	98,82
33			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27.053.000	25.791.500	95,34
34			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.576.000	6.576.000	100
35			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.291.000	6.291.000	100
36			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	11.520.000	11.520.000	100
37			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	62.734.000	59.224.000	94,40
38			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	73.286.000	73.279.600	99,99
39			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.178.944.000	2.165.749.775	99,39
40			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	49.125.000	47.877.500	97,46
41			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	171.150.000	170.505.708	99,62
42			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.085.106.000	927.900.700	85,51
43			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	375.989.000	356.871.100	94,92



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
44			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27.999.216.000	25.915.411.402	92,56
45			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	47.237.000	44.203.560	93,58
46			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.731.814.000	1.630.179.456	94,13
47			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	31.988.000	31.808.000	99,44
48			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22.500.000	21.380.000
49		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	69.675.000	67.175.000	96,41
50	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	713.406.000	706.395.500	99,02
51	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	48.495.000	47.007.856	96,93
52		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	503.431.000	498.376.100	99
53		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	48.750.000	47.530.000	97,50
54	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.127.518.000	2.124.597.450	99,86



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE (%)
55		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	61.695.000	61.686.000	99,99
TOTAL				114.592.355.000	109.431.803.805	95,50

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp 114.592.355.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 109.431.803.805,00 atau sekitar (95,50%).

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

3.4.1 Prestasi Dinas Kesehatan

1. Penghargaan Pembina Program Kesehatan Lingkungan

Dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2024, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan pada Kabupaten/Kota atas capaian kerjanya dalam mencapai target atau SPM bidang kesehatan. Salah satunya Kota Pekalongan mendapatkan penghargaan terbaik ke-IV sebagai Pembina Program Kesehatan Lingkungan. Penilaian ini didasarkan atas capaian kegiatan pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan pada sarana air minum, tempat pengelolaan pangan, dan tempat fasilitas umum, serta dalam implementasi 5 Pilar STBM di Kota Pekalongan.



2. Penghargaan Program Kesehatan Keluarga dan Gizi

Kota Pekalongan meraih Penghargaan Juara II Kabupaten/Kota dengan Capaian Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Terbaik Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jawa Tengah dari berbagai unsur penilaian antara lain:

- Respon aktif terhadap seluruh kegiatan dan program kesehatan keluarga dan gizi
- Ketepatan dan kelengkapan dalam pelaporan baik secara manual maupun aplikasi
- Capaian indikator kinerja sesuai dengan ekspektasi.



3.4.2 Inovasi di Dinas Kesehatan

1. Inovasi KISS BAY (Kiat Sehat Seputar Bayi)

Kiss Bay (Kiat Sehat Seputar Bayi) adalah inovasi media promosi yang kekinian berupa podcast dan buku saku elektronik sebagai upaya promosi dan edukasi kesehatan ibu dan anak. Inovasi ini dilatarbelakangi kasus kematian bayi usia 0 - 1 tahun di Kota Pekalongan yang masih tinggi. Jumlah kasus dalam 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, tahun 2021 ada 52 kasus, tahun 2022 ada 56 kasus dan tahun 2023 ada 67 kasus kematian bayi. Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya, salah satu upaya yang perlu ditingkatkan kualitasnya adalah upaya promosi kesehatan dan edukasi kesehatan ibu dan anak. Inovasi Kiss Bay merupakan media promosi yang



dapat diakses banyak orang dengan tampilan lebih menarik daripada media konvensional yang dapat diakses masyarakat dengan ponsel, akses web, maupun media sosial Dinkes/Puskesmas/Kominfo.

Data dari Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian, Penyakit pada tahun 2024 terdapat 42 kasus kematian bayi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan kasus kematian bayi, yaitu dari 67 kasus menjadi 42 kasus. Salah satu faktor pendukung yang mendukung keefektifan program penurunan kasus kematian bayi adalah adanya media promosi yang baik, di samping faktor-faktor pendukung lainnya. Dengan adanya inovasi Kiss Bay diharapkan pada tahun-tahun berikutnya jumlah kasus kematian bayi akan semakin menurun.

2. Inovasi DIMENSI PEKA

Kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan. Di Kota Pekalongan, isu gangguan mental emosional telah menjadi perhatian yang semakin mendesak. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa prevalensi gangguan mental emosional di masyarakat cukup tinggi sekitar 20%. Gangguan yang dialami seperti stres, depresi dan kecemasan, terus meningkat di kalangan masyarakat. Permasalahan ini diperparah oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya, yang memerlukan perhatian dan penanganan segera. Inovasi Dimensi Peka (Deteksi dini gangguan mental emosional di Kota Pekalongan) muncul sebagai solusi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan ini. Melalui inovasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental, mengurangi stigma sosial, memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan mental, serta memungkinkan deteksi dan intervensi dini yang efektif. Inovasi ini juga diharapkan dapat mengumpulkan data yang lebih akurat mengenai prevalensi dan karakteristik gangguan mental emosional di masyarakat, yang akan sangat berguna untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan yang lebih baik.

Program DIMENSI PEKA memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

- Dengan mendeteksi dini gangguan mental emosional pada Masyarakat di kota Pekalongan terutama yang berusia 14 sampai 59 tahun masalah dapat diidentifikasi dan diintervensi lebih cepat dan efektif.
- Program ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, mengurangi stigma, dan mendorong masyarakat untuk mencari bantuan.



- Program ini menyediakan akses ke layanan konseling profesional, memastikan lebih banyak orang mendapatkan perawatan yang diperlukan.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan kesehatan mental prioritas, mencegah meningkatnya gangguan jiwa, dan mengurangi beban sosial dan ekonomi.
 - DIMENSI PEKA memberikan dukungan komprehensif dan holistik, memastikan kesehatan mental mendapatkan

Dengan inovasi DIMENSI PEKA maka petugas bisa mendeteksi gangguan mental emosional yang ada di masyarakat dengan lebih awal serta dapat mengetahui kondisi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehingga dalam membantu dalam memberikan intervensi yang tepat waktu dan mencegah perkembangan gangguan menjadi lebih parah. Hal ini berarti individu dapat menerima perawatan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka, meningkatkan peluang kesembuhan dan pemulihan yang optimal. Selain itu, dengan mengelola gangguan mental secara proaktif, program ini juga berpotensi meningkatkan kualitas hidup individu yang terkena dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kehidupan sehari-hari. Selain manfaat individual, program ini juga memberikan dampak positif pada tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah kesehatan mental serta dapat menurunkan angka prevalensi gangguan jiwa di Kota Pekalongan.



BAB IV PENUTUP

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2024 merupakan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Hasil capaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

➤ **Sasaran strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari indikator kinerja :**

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Kesehatan sebesar 83,2 dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,85%.

➤ **Sasaran strategis 2 Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, terdiri dari indikator kinerja :**

Berdasarkan penilaian SPM Kesehatan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bahwa untuk penilaian tahun 2024 nilai capaian SPM Kesehatan sebesar 97,52%. Sehingga capaian untuk indikator kinerja SPM Kesehatan sebesar 97,52%.

Dari hasil capaian Sasaran Strategis di atas, maka upaya yang akan dilakukan di masa mendatang adalah:

1. Melakukan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan tahun 2024 dengan meningkatkan koordinasi terhadap stakeholder terkait.
2. Meningkatkan upaya promosi kesehatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sebagai upaya peningkatan capaian SPM Kesehatan yang lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :



No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
I	Pendapatan			
	Pendapatan Asli Daerah			
	Hasil Retribusi Daerah	257.808.000	513.905.400	218.861.500
	Lain-lain pendapatan yang sah :			
	BLUD Puskesmas	20.688.561.000	21.425.226.631	20.661.513.989
	BLUD BPSJ	200.000.000	180.388.944	175.135.250
	JUMLAH PENDAPATAN	21.146.369.000	22.119.520.975	21.055.510.739
II	Belanja			
	Belanja Tidak Langsung	109.066.879.000	103.937.375.915	92.733.005.611
	Belanja Pegawai	62.294.085.000	59.765.258.767	54.065.309.216
	Belanja Langsung	5.525.476.000	5.494.427.890	13.588.990.058
	JUMLAH BELANJA	114.592.355.000	109.431.803.805	106.321.995.669
	Surplus/Defisit	8.554.014.000	(108.917.898.405)	(106.103.134.169)

Secara umum, serapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 cukup baik dan efisien. Beberapa anggaran tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan hal-hal yang terjadi di luar perencanaan. Masih adanya indikator kinerja yang belum mampu dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, menunjukkan perlu adanya peningkatan kinerja dan analisis penyelesaian terhadap hambatan yang ada sehingga seluruh target yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dan sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan



Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 199303 1 005

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM, M.Kes.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 9 Desember 2024

Pihak Kedua,

Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Kesehatan

Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM., M.Kes

NIP. 197101118 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Kerja : Kepala Dinas Kesehatan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	Formulasi : Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,35	Formulasi : Hasil Pendataan PIS PK Dinas Kesehatan Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinas Kesehatan
Sasaran :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal	Persentase capaian SPM Kesehatan	100	Formulasi : Rata-rata capaian indikator SPM Bidang Kesehatan Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinas Kesehatan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 64.762.812.000	Sumber Anggaran: APBD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 46.326.248.000	Sumber Anggaran: APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 713.406.000	Sumber Anggaran: APBD
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 600.676.000	Sumber Anggaran: APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 2.189.213.000	Sumber Anggaran: APBD

**Pihak Kedua,
Wali Kota Pekalongan**



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

Pekalongan, 9 Desember 2024

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kesehatan**



Dr. SLAMET BUDIYANTO, SKM., M.Kes
NIP. 197101118 199303 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	-	87,50	88,00	88,50	82,50	83,00	83,50	Inspektorat Daerah	Dinkes
2	Tercapainya Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	Rata-rata capaian indikator SPM bidang kesehatan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	88,06	100	100	100	100	100	100	Dinkes	Dinkes

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan



Dr. AMET BUDIYANTO, SKM., M.Kes.

NIP. 197101118 199303 1 005